

BAB V

KESIMPULAN & IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

- 1) Resistensi berbasis identitas yang mengakar dari kelompok sasaran menjadi faktor kuat kurang optimalnya kebijakan. Meski paham aturan dengan baik, hal tersebut tidak serta merta membuat pengguna knalpot menjadi berubah sikap dan mematuhi kebijakan. Hal ini juga disebabkan karena motivasi pendorong kepatuhan tidak berjalan. Dari segi ekonomi, sanksi denda dan penyitaan telah terkalkulasi sebagai biaya wajar demi preferensi manfaat yang mereka pilih. Lebih krusial, identitas ini diwariskan lintas generasi, sedangkan tekanan dari lingkungan sosial lemah.
- 2) Strategi penindakan yang timpang secara geografis. Penindakan yang terkonsentrasi di titik keramaian dan mengabaikan wilayah lain menciptakan *safe haven* bagi pelanggar. Pola ini merupakan wujud *creaming* yang disebabkan oleh sumber daya terbatas, tetapi juga pada gilirannya memicu adaptasi rasional dari kelompok sasaran yang mengembangkan cara penghindaran dengan memetakan lokasi Razia. Selain itu dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat yang berada di titik buta implementasi kebijakan, dimana wilayah-wilayah yang tidak tersentuh ini mengalami stagnansi kondisi lingkungan yang tidak nyaman karena bising knalpot meskipun kebijakan sudah diberlakukan.
- 3) Kebijakan ini dihadapkan pada tantangan yang cukup kompleks. Meskipun implementor telah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah

yang menjadi pusat reproduksi subkultur knalpot brong, implementor tidak menyentuh usaha knalpot tersebut selain sekedar memberikan himbauan. Akibatnya, rantai pasok ekonomi tetap utuh, yang kemudian kelompok sasaran terpenuhi *demand*-nya. Disaat yang bersamaan, kebijakan tidak memberikan solusi atau alternatif kepada penjual knalpot yang menggantungkan usaha tersebut untuk bertahan hidup.

5.2 Implikasi

- 1) Diperlukan pergeseran pendekatan penindakan dari strategi yang berpusat di wilayah keramaian menuju model yang lebih merata secara geografis. Distribusi patroli yang proporsional di seluruh wilayah akan mengurangi terbentuknya *safe haven* bagi pelanggar dan meminimalisasi kemampuan adaptasi rasional kelompok sasaran dalam menghindari razia. Secara praktis ini bisa dilakukan dengan patroli bergilir ke wilayah-wilayah yang selama ini belum tersentuh. Hal ini tentu menuntut penguatan koordinasi lintas satuan wilayah dan dukungan sumber daya agar penegakan hukum tidak bersifat terpusat dan mudah diprediksi.
- 2) Resistensi berbasis identitas memerlukan intervensi yang tidak hanya bersifat represif dan preventif, tetapi juga transformasional. Pendidikan mengenai etika berkendara perlu memiliki jangkauan yang lebih luas, disertai pemupukan nilai-nilai identitas alternatif secara masif agar mampu mengubah preferensi pengguna. Upaya ini dapat dilakukan melalui sosialisasi holistik yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, tetangga untuk memberikan kontrol

sosial, komunitas lokal, hingga influencer populer yang digandrungi oleh kalangan muda, sehingga pesan yang dibawa lebih mudah diterima dan diinternalisasi oleh kelompok sasaran. Kemudian nilai-nilai kepatuhan diperkuat di lingkungan sekolah dengan melarang pengguna knalpot brong untuk memasuki wilayah sekolah, karena dalam hal mengubah nilai-nilai intrinsik perlu dilakukan pembiasaan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sosialisasi melalui media sosial juga bisa dioptimalkan lagi dengan mengajak *Key Opinion Leader* di Banyumas. Narasi edukasi perlu eksekusi dengan pendekatan humanis dan emosional untuk menyentuh sisi kemanusiaan kelompok sasaran. Untuk memperluas jangkauan dan target audiens, memanfaatkan tools Ads mungkin bisa dipertimbangkan, namun tentu hal ini perlu didukung oleh komitmen dari manajerial dengan dukungan sumber daya yang memadai.

- 3) Rantai pasok perlu diintervensi oleh kebijakan. Untuk melakukan upaya tersebut tentu saja memerlukan sinergi antar-lembaga yang lebih baik. Implementasi kebijakan tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Diperlukan kerja sama antara kepolisian, pemerintah daerah, dinas perindustrian, dan komunitas lokal untuk memastikan bahwa masalah ini ditangani dari hulu ke hilir. Tujuannya adalah untuk memutus rantai pasok, menekan permintaan, dan pada saat yang sama memberikan solusi yang adil bagi pihak-pihak yang terdampak.